



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI PERTUKARAN PNS DENGAN PEGAWAI SWASTA/BUMN/BUMD

NAMA : Drs. SENO HARTONO, DESS
N I P : 19680104 199401 1 001
KELAS : B
N D H : 24

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

Executive Summary
Model Pengembangan Kompetensi Melalui Pertukaran PNS dengan
Pegawai Swasta/BUMN/BUMD
Oleh: Drs. Seno Hartono, DESS

Mentor: Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA

Coach : Drs. Domo Abdi, M.Si

Pembangunan SDM Aparatur menjadi perhatian yang cukup serius oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada RPJPN 2005-2025, pengembangan kompetensi menjadi kunci dalam milestone pembangunan ASN. Secara khusus pada RPJMN ke-2 (2015-2019) pemerintah telah menerbitkan UU No. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN) yang memberikan landasan awal bagi pengelolaan SDM Aparatur dan pengembangan kompetensi ASN. Melalui kebijakan tersebut, setiap instansi pemerintah didorong untuk melakukan akselerasi pengembangan kompetensi SDM Aparaturnya. Salah satunya adalah pencanangan hak PNS untuk mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahunnya.

Namun demikian, kualitas ASN perlu diakselerasi menghadapi era industri 4.0 yang menuntut profesionalitas, kreatifitas, dan kelincahan (*agile*). Sehingga kebutuhan pengembangan kompetensi ASN tidak hanya sekedar bersifat di dalam kelas atau metode klasikal namun juga di luar kelas atau juga disebut metode non-klasikal. Berdasarkan UU ASN dan PerLAN No. 10 Tahun 2018, salah satu metode pengembangan kompetensi ASN non-klasikal adalah Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/BUMD. Akan tetapi, hingga 5 tahun setelah diterbitkan UU ASN, model pelaksanaan Pertukaran PNS dan Pegawai Swasta/BUMN/BUMD belum pernah dijabarkan lebih lanjut.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merupakan instansi yang mendapatkan amanah guna menjabarkan lebih lanjut mengenai berbagai metode pengembangan kompetensi ASN. Oleh karena itu, Proyek Perubahan Diklatpim II ini berupaya untuk memformulasikan model Pertukaran Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Swasta/BUMN/BUMD.

Proyek ini telah melibatkan berbagai pihak dalam menggalang komitmen dan merumuskan bersama model Pertukaran PNS dan Pegawai Swasta/BUMN/BUMD. Terdapat beberapa pihak profit dan non-profit yang telah mendukung sepenuhnya program pertukaran seperti Bank Mandiri, OJK, GIZ, CSIS dan *World Bank*. Selain itu telah dilakukan literature review dan *benchmarking* atas praktik pertukaran di 3 negara yakni; (a) Irlandia, (b) Australia, dan (c) Swedia serta praktik *Secondment* pada (a) Kementerian Keuangan dan (b) OJK.

Selain itu, dalam jangka pendek telah dilakukan Ujicoba Pelaksanaan Pertukaran Pegawai dalam skala kecil di lingkungan internal LAN RI, yang melibatkan 2 Kedeputan atau 6 unit eselon II dengan 8 orang peserta. Melalui ujicoba tersebut telah diidentifikasi berbagai macam kendala yang mungkin muncul dalam program pertukaran dan strategi dalam mengatasinya.

Secara garis besar, Pelaksanaan proyek perubahan telah berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan berjalannya *milestone* jangka pendek secara menyeluruh. Selain itu, proyek perubahan ini memiliki peluang keberlanjutan tinggi dengan ditetapkannya sebagai program unit PIMBANGKOM ASN pada tahun 2020. Ke depan model pertukaran PNS Pegawai Swasta/BUMN/BUMD akan diujicobakan dalam lingkup lebih luas mulai dari antar-kementerian/lembaga (*milestone* jangka menengah), dan antara organisasi publik dengan swasta (*milestone* jangka panjang) pada tahun 2020.